Reorientasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Para Guru Besar UIN di Indonesia

Andi Iswandi

Institut PTIQ Jakarta,
Jl. Batan I No. 2 Pasar Jum'at,
Lebak Bulus, Cilandak,
Jakarta Selatan 12440,
Indonesia
andiiswandi@ptiq.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the views of Islamic academics, especially the professors of the State Islamic University in Indonesia (Muhammad Amin Suma, Musdah Mulia, M. Amin Abdullah, and Sahiron Syamsudin) regarding their views in seeing the reality of Islamic Family Law in Indonesia from time to time. This study uses a descriptive normative and legal literature review approach, namely a description of the current situation regarding the views of academics in Islamic legal research. This research leads to the conclusion that the formation of the Islamic Law Compilation is responsible and consistent. Reorientation of Islamic Family Law is a necessity for a pluralistic Indonesian society and is constantly developing. Compilation of modern Islamic law and maintaining Indonesian culture with dignity becomes an integrated and interconnective Madani KHI between classical KHI, CLD-KHI, and RUU-HMPA. When this happens, the taqinization (Islamization) of national law will be realized.

Keywords: Existence, Reorientation, Islamic Family Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pandangan Para Akademisi Islam khususnya Guru Besar (Profesor) di Universitas Islam Negeri Indonesia (Muhammad Amin Suma, Musdah Mulia, M. Amin Abdullah dan Sahiron Syamsudin) analisis tentang pandangan mereka dalam melihat kenyataan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) di Indonesia dari masa ke masa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur hukum dan normatif deskriptif yakni gambaran keadaan terkini tentang pandangan-pandangan akademisi dalam penelitian hukum Islam. Penelitian ini bermuara pada kesimpulan bahwa pembentukan Kompilasi Hukum Islam bersifat responsibilitas dan konsisten dari masa ke masa. Reorientasi Hukum Keluarga Islam merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk dan senantiasa berkembang. Kompilasi Hukum Islam yang modern dan menjaga budaya keindonesiaan dengan bermartabat menjadi KHI Madani yang integratif dan interkonektif antara pihak pendukung KHI klasik, CLD-KHI dan RUU-HMPA. Bila ini terjadi maka akan terwujudlah taqinisasi (islamisasi) hukum nasional yang berkeadilan.

Kata Kunci: Eksistensi, Reorientasi, Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Permasalahan hidup tentu tak pernah lepas dari manusia. Peradaban manusia terus berkembang penuh dengan romantika dan dinamikanya sehingga diperlukan kehati-hatian hidup dari segala aspek (Mosten, 2017). Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat hidup sendiri, sehingga perlu berpasang-pasangan. Hikmahnya manusia dapat meneruskan keturunan dengan penuh kebahagiaan. Persoalan egoisme, harapan kebahagiaan, pemenuhan kebutuhan yang tak terpenuhi menjadikan manusia sering kali frustrasi dan kecewa, tak sedikit melampiaskan kekesalan kepada pasangan dan anggota keluarga (Kojima, 2020). Secara prinsip, memang idealnya manusia terus melanjutkan peradaban dengan menjalankan sunah nabi Muhammad Saw dengan mahligai indah pernikahan menggapai kebahagiaan, kasih sayang bersama pasangan (Rohman, 2017). Di sinilah urgensi hukum yang menjadi instrumen terakhir untuk mendapatkan hak keadilan dan perlindungan dari kezaliman orang lain atau pun internal keluarga sendiri, sehingga keluarga dan anggotanya dapat dipastikan memiliki hak-hak terhadap hak asasi manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga seringnya menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan dan ketidakadilan (Putra, 2019). Sadari (2017) mengilustrasikan ketidakadilan fikih yang diterima oleh perempuan dengan memotret simbol Dewi Themis, seorang perempuan yang membawa pedang tajam bermata dua dengan mata tertutup kain hitam seakan penuh makna adanya kekuatan pertimbangan, keadilan yang objektif dan tanpa pandang bulu. Namun, makna akhir tadi tak terbukti pada korban kekerasan perempuan, mereka malah sebaliknya menjadi korban Dewi Themis untuk kedua kalinya karena tak dapat melihat ketajaman neraca timbangan dan pedang tajam tak terarah dengan baik. Padahal

menurut Sadari dengan mengutip Surah Al-Maidah ayat 8 (perintah Allah agar berbuat adil) dan pendapat Tullius Cicero yang menyerukan agar tetap berbuat adil walaupun langit akan runtuh (Riggsby, 2018) dan bahwa fitrah kemanusiaan adalah terwujudnya rasa keadilan (Stewart, 2018). Pada intinya dikatakan bahwa ditemukan adanya ketidaksesuaian (asimetris) antara produk hukum keluarga Islam dengan gerak modernitas dalam menemukan momentumnya (Sadari, 2017: vii).

Kajian tentang hukum keluarga Islam dijadikan sebagai hukum formal dalam perspektif sejarah politik hukum di Indonesia yang telah dimulai sejak era Orde Lama dan Orde Baru (Hikmatullah, 2018). Saat ini pada era Reformasi pembaharuan terhadap hukum Islam semakin digalakkan, banyak kalangan menganggap bahwa saat ini lebih cenderung demokratis sehingga Rancangan KHI baru diprediksi dapat lolos dan diamini oleh semua kalangan. Namun, perhitungan mereka meleset, eksistensi para ulama dan akademisi dan golongan islamis masih pada ketetapan sakral, yakni KHI tidak dapat diganggu-gugat. Dukungan terhadap KHI lama masih lebih banyak dibanding mereka yang progresif yang terus menerus memperjuangkan pembaharuan KHI secara kontekstual dengan alasan serta alibi pengarusutamaan gender. Dominasi pemikir dan pendukung pembaharuan oleh kelompok Islam Liberal (Ma'rifah, 2019:252). Pandangan bahwa konfigurasi politik belum dapat mempengaruhi hukum keluarga Islam. Masyarakat Indonesia masih kuat mempertahankan pandangan klasik tentang hukum keluarga dan tak ingin ada pembaharuan oleh mereka yang merasakan ketidakadilan pada sisi gender padahal saat ini justru menurut beberapa kalangan dominasi perempuan telah melampaui laki-laki dalam segala hal (Marjono, 21 September 2020). Pada

intinya, pembaruan KHI di Indonesia seyogianya akan menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga Islam, meski dengan pemahaman yang mapan dalam bidang Alquran, hadis dan berbagai kita fikih masih dianggap tidak akan dapat menjawab tantangan problematika hukum keluarga yang modern (Fitri, 2020).

Fobia dan paranoid akan penerapan syariah Islam pada Kompilasi Hukum Islam sering kali dilatarbelakangi praktik aplikasi ekstensif yang dianggap sangat maksimal dalam penerapannya seperti negara Afganistan yang dikenal dengan generasi Taliban. Generasi ini telah tumbuh sebagai generasi Islam yang dianggap kurang bersahabat dengan peradaban, segala jenis yang berkaitan dengan Takhayyul, Bid'ah, Khurafat harus dibumihanguskan. Hak-hak perempuan dikekang dan tak ada pengarusutamaan gender. Perempuan harus selalu menuruti laki-laki sebagai pengayom mereka. Meski demikian menurut Lippman bahwa islamisasi hukum domestik akan menghadirkan beragam masalah Hak Asasi Manusia (HAM), pandangannya menyatakan bahwa kebanyakan ulama Islam masih memandang syariah Islam sebagai sesuatu yang konsisten, meskipun mereka menyadari dan sepakat dengan konsep kemanusiaan di atas segala dan itu ada pada tujuan syariah (Lippman, 1989).

Beragam pendapat tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Khalid, 2018). Meski masyarakat muslim menjadi mayoritas secara angka statistik tetapi tidak berbanding lurus dengan pemahaman keislamannya atau lebih spesifik dikatakan hanya sedikit sekali yang paham betul tentang hukum keluarga Islam (Ishomuddin, 2018). Kesan negatif terhadap syariah lebih menonjol dibandingkan konteksnya yang luas dan luwes cerminan sisi positif menjadi pengamalan. Pro kontra terhadap penerapan syariah Islam di Indonesia

masih terus bergulir (Nurhakim, 2011). Keyakinan terhadap mitos lebih cenderung diamini oleh masyarakat (Zenrif, 2008). Sejak jaman kemerdekaan 1945 bangsa ini selalu diterpa permasalahan politik internal, baik secara ideologis maupun konstitusionalis, namun, sampai saat tahun 1990 hingga saat ini masih terasa antara pihak tekstual maupun kontekstual belum didapat digabungkan secara pisik (Sholahudin, 2016).

Taqninisasi Hukum Islam di Indonesia

Menurut guru besar UIN Syarif Hidayatullah Prof Dr Muhammad Amin Suma, perkembangan hukum Islam di Indonesia dan secara global terutama sejak 25 tahun terakhir telah terjadi kesadaran kolektif terhadap implementasi hukum. Hukum dan transformasi budaya dalam menuntut rasa keadilan, pemerataan dan keseimbangan terus menjadi prioritas utama. Taqninisasi atau islamisasi peraturan perundang-undangan juga mulai terjadi dan telah banyak menghasilkan produk hukum. Dalam sejarahnya, justru Taqninisasi hukum Islam pada masa kepemimpinan Soeharto (orde baru), di antaranya disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disusul Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tentang Perkawinan, dilengkapi dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tak sampai di situ, taqninisasi terus berlanjut dengan diketukpalukannya UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lengsernya rejim orde baru ternyata menguatkan taqninisasi hukum Islam dalam bidang ekonomi dan keuangan terbukti dengan disahkannya Undang-undang 19 tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah (Suma, 2016: 68-830).

Taqninisasi hukum Islam menjadi jalan keluar *win-win solution*, mengingat sepeninggal Rasulullah Saw permasalahan menyangkut hukum dan agama terus bermunculan, sebagian besar kasus masalahnya tidak ditemukan yurisprudensinya semasa nabi dan sahabatnya (Hermansyah, 2018). Di sinilah peran ulama untuk mengambil posisi ijtihad (Ansori, 2017). Kaidah-kaidah (metodologi) disepakati untuk mempermudah *istinbath* hukum atas permasalahan hukum yang bersifat ijtihadi (Mutakin, 2017). Tidak jarang terjadi perselisihan yang tidak menemui jalan tengah (*mukhalaf fiha*), para ulama tentu diharapkan tidak memaksa kehendak antara satu dengan yang lainnya (Abdul Ali, 2020). Para akademisi dalam memahami perbedaan di antara para ulama dengan menggunakan metode perbandingan dan juga ditambahkan dengan *Explanation methode* atau dikenal dengan Syarh (Eka Sakti, 2017).

TINJAUAN TEORITIS

Pandangan yang keliru bila islamisasi hukum (taqninisasi) ditakutkan akan melegalkan hudud atau kisas seperti yang ada di negara-negara timur tengah. Ketakutan dan kekawatiran ini telah terjawab sejak lama di Indonesia melalui berbagai dukungan politik dan komunitas agama, dan masyarakat secara luas (Ma'rifah, 2019). Mustahil dengan kesepakatan dan kesolidan umat Islam dalam memahami Islam *Rahmatan lil'alam* hal ini tentu ada peran civil society dan para ulama serta pesantren yang sangat besar disini (Argenti, 2017). Hukum dan hikmah keduanya memiliki akar yang sama pada bahasa Arab. Hukum dasar adalah hukum Allah SWT yang diyakini tidak bertentangan dengan hikmah, tidak mungkin hukum-Nya akan

kontradiktif terhadap kebenaran, sampai kebenaran itu bila belum ditemukan bukan alasan meninggalkan Hukum sebagai perintah Allah (Amin, 2014). Meski banyak tantangan, islamisasi hukum akan terus bergulir sepanjang waktu, akan tetapi norma, tujuan, dan asas hukum harus menjadi landasan hukum. Hasil dari islamisasi hukum Islam akan memperkaya diskursus ilmu hukum sebagai instrumen menggapai rasa keadilan dan hak-hak asasi manusia. Pada penelitian ini merangkum perdebatan akademik tentang reorientasi hukum keluarga Islam dengan melihat pandangan-pandangan para guru besar (profesor) kajian studi Islam pada Universitas Islam Negeri di Indonesia.

Telaah terhadap pengertian hukum keluarga, akan ditemukan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian, sebagaimana ini terdapat pada pandangan fikih di berbagai literatur (Rahmi Ria, 2017). Secara umum, tentu literatur ini telah dihasilkan oleh para ulama dengan ijtihadnya untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim sesuai dengan masanya. Hukum keluarga ini dapat ditemukan di empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sayangnya, pemahaman empat mazhab ini masih dianggap tidak relevan lagi bagi sebahagian kelompok saat ini. Anehnya lagi, masyarakat saat ini cenderung mengikuti normat adat saja tanpa mengindahkan hukum keluarga Islam atau bahkan lebih taat pada aturan perkawinan secara nasional (undang-undang) tanpa nilai-nilai agama. Dalam hukum keluarga tentu yang diatur padanya adalah pertalian keluarga. Pertalian yang disebabkan garis darah, pernikahan, hubungan kekerabatan, hukum waris, perwalian (Ali, 1997: 90).

Al-Qur'an dan hadis adalah sumber hukum yang diyakini oleh muslim. Sehingga hukum keluarga juga berasal dari ketentuan yang terhadap padanya. Sumber hukum kemudian menghasilkan

pemahaman terhadap fikih, fatwa dan peraturan perundang-undangan. Fikih yang berkaitan dengan perkawinan dengan segala akibat hukumnya banyak dijelaskan pada fikih perkawinan. Urusan tentang harta warisan diatur pada faraid. Indonesia meski tidak menyatakan diri sebagai negara Islam akan tetapi mengatur produk hukum Islam (taqnisasi) menjadi peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, penerapan hukum barat sekuler memang tidak dapat dibuktikan secara langsung, tetapi bila dilihat asal muasal hukum yang telah cukup lama digunakan yaitu hukum perdata (Burgelijk Wetboek) hukum acara perdata (reglemen Indonesia yang diperbarui) warisan Belanda,

Mendalami teori islamisasi perlu dikaji Teori Receptie adalah teori yang mengharuskan pemberlakuan hukum Islam dengan hukum adat di kalangan masyarakat jika tidak ada pertentangan (Husda, 2017). Sebaliknya, Jika hukum Islam bertentangan dengan hukum adat, maka hukum Islam tidak boleh diberlakukan Snouck Hurgronje dan C. van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn (Yuspin, 2018).

Pada kondisi akhir ada Teori Receptie Exit adalah teori yang menegaskan bahwa teori receptie tidak berlaku lagi dan harus exit (keluar) karena bertentangan dengan Alquran dan Sunnah. Teori ini dikemukakan oleh Hazairin (Zaelani, 2019). Teori Receptio a Contrario adalah teori yang memuat ajaran teori yang merupakan kebalikan dari teori receptie Teori ini dikemukakan oleh Sajuti Thalib. Teori ini pengembangan dari teori *receptie exit* yang dikemukakan oleh Hazairin. Teori *Receptio in Complexu* adalah teori yang mengatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab ia telah memeluk agama Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini dikemukakan oleh L.W.C. van den Berg (Jarir, 2018: 77)

Muhammad Nasir (2017) mengangkat isu bahwa Kompilasi Hukum Islam dilihat dari sudut pandang Ulama Dayah Aceh tentang pembaharuan Islam memang sudah sangat mendukung dan membela hak-hak perempuan, sehingga agak keliru bila ada pihak yang masih terus ingin merubah KHI. Setidaknya ada tiga teori yang digunakan pada makalahnya yakni; Teori Relasi Negara dan Agama, Teori Otoritas Ulama dan Negara, dan Teori *Concervative Turn*. Temuannya menyatakan bahwa Ulama Dayah di Aceh tidak sependapat dengan aspek KHI pada sisi pendaftaran pernikahan, harta kekayaan bersama serta prosedur hukum perceraian, hal ini karena para ulama Dayah Aceh tidak diikut sertakan dalam proses penyusunan rancangan naskah KHI.

METODE PENELITIAN

Pembahasan tema reorientasi membutuhkan pandangan-pandangan lengkap dan mendalam sebagai jawaban atas rangkuman terhadap permasalahan yang diajukan sesuai dengan penelitian normatif-empiris. Data lain dari kepustakaan dijadikan rujukan dengan metode studi dokumentasi dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif memperhatikan fakta dilapangan dan digabungkan dengan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan sehingga hasil analisis dideskripsikan dengan paparan dan penjelasan yang ditemukan dalam penelitian (Cresswell, 2009). Deskriptif analisis kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan memotret keadaan yang saat ini terjadi secara langsung, atau bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan yang sedang berlangsung atau terkini (Mardalis, 1999: 26).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Musdah Mulia Terhadap Reorientasi Hukum Keluarga Islam

Melihat dan mencermati pemikiran dan pandangan guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Musdah Mulia, MA, yang dilampirkan oleh Sadari dalam kata pengantar bukunya yang diberi judul “*Reorientasi Hukum keluarga Islam*” yang sebelumnya adalah karya ilmiah disertasi yang berjudul “*Sakralisasi vis-a-vis Desakralisasi hukum keluarga Islam di Indonesia*”. Menurut Musdah, penolakan peningkatan usia perkawinan membuktikan bahwa umat Islam masih menganggap hukum keluarga hal yang sakral sehingga tidak mungkin dapat diubah. Menurut Musdah, pemberlakuan pembaharuan atas hukum keluarga Islam berbeda dengan hukum Islam lainnya yang telah banyak berubah seperti ekonomi, politik dll.

Gugatan usia perkawinan pada yang disebutkan oleh Musdah ini adalah berawal dari hasil Sensus nasional yang dilakukan pada 2012. Sensus ini adalah sebuah kerja sama dengan Badan Persatuan Bangsa-Bangsa (UNICEF) yang membawahi kepentingan anak-anak di seluruh dunia. Hasil sensus menunjukkan bahwa banyak dari anak perempuan menikah sebelum usianya genap 18 tahun bahkan ditemukan banyak yang telah menikah sebelum berusia 15 tahun ([BBC Indonesia, 18 Juni 2015](#)). Alhasil gugatan Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Hak Anak ini ditolak hakim, karena menurut hakim tidak ada hubungan antara permasalahan yang diajukan dengan batas usia minimal menikah. Dan juga tidak menjamin bila usia minimal dinaikkan maka angka perceraian akan berkurang lebih jauh, serta hakim menambahkan bahwa tidak ada aturan dalam agama Islam yang menjelaskan batasan usia menikah. Menanggapi putusan MK ini Musdah Mulia menyatakan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki keraguan untuk dapat menerobos perubahan. Keraguan hakim MK

menurutnya disebabkan adanya tekanan keras dari kelompok tradisional.

Di berbagai belahan dunia menurut Musdah Mulia umat Islam setuju melakukan pembaharuan hukum. Dia memberikan contoh hukum yang telah mengalami pembaharuan seperti tata negara, politik, perdagangan, ekonomi dan hukum pidana tetapi tidak untuk hukum keluarga yang dianggap sebagian besar umat Islam adalah hukum Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat karena berperan sebagai inti syariah atau disebut “*The Essence of Shari’ah*”. Bentuk pola pikir yang tidak logis menurut Musdah Mulia telah berkembang dalam masyarakat Islam di Indonesia. Kaidah *al-adat muhkamat* dalam teori hukum Islam menurutnya menjadikan hukum sebagai aturan-aturan normatif yang mengelola pola perilaku manusia. Hukum menurutnya harus tumbuh dari kesadaran kelompok masyarakat sehingga adanya aturan bersama yang dibutuhkan “bukan tumbuh di ruang vakum” tegasnya. Dari sini dapat diambil inti sari pemikirannya bahwa adat atau tradisi suatu kelompok masyarakat termasuk nilai-nilai adat yang berkembang dalam suatu masyarakat dapat dijadikan hukum dan tentu ini memiliki konsekuensi, yakni setiap produk hukum harus dilihat sebagai produk zaman yang sulit dilepaskan dari pengaruh-pengaruh yang melingkupi kelahirannya. Pengaruh yang dimaksudkan Musdah Mulia adalah pengaruh sosio-kultural maupun pengaruh sosio-politik, dan ideologi.

Pada intinya Musdah Mulia menyalahkan pandangan yang mengatakan bahwa hukum keluarga Islam tidak dapat diubah karena menurutnya hukum keluarga yang berlaku di dunia Islam adalah produk ijtihadi. Dia menjelaskan lebih dalam tentang produk ijtihadi adalah upaya memahami pesan-pesan moral Islam dengan sungguh-sungguh sebagaimana terkandung dalam

teks suci yang bersumber dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Produk ijtihadi ini bertujuan meningkatkan kemajuan dan kemaslahatan umat Islam dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi meskipun demikian, Musdah Mulia tetap mensyarakatkan pembaruan hukum keluarga Islam dalam enam prinsip pokok: (1) bentuk perubahan sosial akibat dinamika zaman yang terus berkembang. (2) pembaruan bukan pada dasar-dasar prinsip agama Islam. (3) mengedepankan prinsip "menjaga hal lama yang relevan dan mengambil hal baru yang lebih baik". (4) adanya sikap kritis terhadap khazanah ulama klasik. (5) adanya pemahaman dan pengkajian kembali terhadap seluruh tradisi Islam. (6) berpegang kepada maqashid al-Ahkam al-Syar'iyah (Sadari, 2017: xi).

Musdah Mulia dengan pemikirannya dan hasil kajian kritisnya terhadap Kompilasi Hukum Islam yang disahkan pada tahun 1991 meluncurkan hasil kajian pada tahun 2004 yang diberi nama Counter Legal Draft – Kompilasi Hukum Islam atau disingkat CLD-KHI yang menyodorkan 19 isu yang harus mengalami pembaruan dalam hukum keluarga. Kajian kritis ini didasari dua alasan penting oleh Musdah Mulia: (1) Penghapusan kekerasan terhadap perempuan, (2) Mayoritas responden hakim agama, kepala KUA, dan tokoh-tokoh agama menghendaki perubahan KHI. Survey yang dilakukan pada akhirnya merekomendasikan enam hal, yakni: pencatatan perkawinan menjadi rukun perkawinan, peningkatan batas usia nikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, adanya nusyuz bagi suami, perlu izin istri bila suami ingin ruju', perlunya pelarangan poligami yang lebih ketat, hal terakhir perlunya ada payung hukum perkawinan beda agama di masyarakat karena menurut Musdah Mulia jumlahnya akhir-akhir ini semakin meningkat (Sadari, 2017: xiv).

Upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia menurut Musdah Mulia adalah bukti telah muncul kesadaran baru umat Islam Indonesia. Menurutnya kesadaran bahwa agama bukan hanya untuk kepentingan laki-laki saja, dalam agama berlaku untuk semua jenis, kelamin, suku, kelompok dan juga agama. Ruh Islam terletak pada etikanya yang membebaskan seperti konsep tauhid, yakni dia jelaskan bahwa tauhid itu bersifat pengakuan tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Sampai pada satu kesimpulan besar Musdah Mulia menyatakan bahwa Umat Islam Indonesia butuh penyegaran baru dalam keluarga mereka terutama dalam hukum keluarga yang akomodatif terhadap humanisme dan keniscayaan pengarusutamaan gender.

Pandangan M. Amin Abdullah Terhadap Reorientasi Hukum Keluarga Islam

Masyarakat muslim di Indonesia terpecah menjadi dua kubu menurut Prof. Dr. Amin dalam hal menyikapi Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama (RUU-HMPA). Kubu yang menolak (kontra) dan kubu yang mendukung (pro), atau diistilahkan dengan kata lain kubu sakral vs kubu desakral. Alasan penolakan pembaruan KHI ini karena dianggap terburu-buru. Kesan terburu-buru ini tentu akan menghasilkan bias hukum dan terkesan tak matang dalam pemikiran dan filosofi. Menurut Amin Abdullah banyak undang-undang diasumsikan merugikan pihak otoritas ulama terkhusus isu perkawinan, di samping itu KHI hasil pembaruan dianggap telah menghilangkan kesakralannya.

Berbeda dengan pihak pro atau yang mendukung pembaruan/desakral terhadap KHI menurut Amin Abdullah masih memiliki nuansa abad pertengahan

sehingga dipertanyakan efektivitasnya dalam mengatasi persoalan zaman yang selalu bergerak. Pada poin ini menurut Amin para pendukung desakral bersikukuh bahwa dengan pembaruan KHI akan membawa masyarakat pada posisi kesejahteraan. Menurut Amin seharusnya KHI baru datang menawarkan jawaban atas keresahan masyarakat muslim di Indonesia yang telah jauh meninggalkan KHI. Dan pada akhirnya Amin Abdullah berpendapat persoalan kubu pro dan kontra belum ada wasit yang adil yang dapat menengahi antara mereka secara interkoneksi pada tataran integratif hukum.

Menyikapi persoalan reorientasi hukum keluarga Islam ini, Amin Abdullah juga mengajak pembaca melihat paradigma interkoneksi pada Disertasi Sadari, bahwa tawaran KHI baru seharusnya adalah KHI progresif modernitas dan keindonesiaan, KHI ini dipadukan antara KHI klasik (1991) dengan CLD-KHI atau RUU-HMPA. Diharapkan KHI baru tidak saja terpaku sakralitas tetapi juga memperhatikan desakralitasnya. Tentu, menurut Amin Abdullah ini perlu cara cantik, cermat dan perlahan yakni tanpa harus memposisikan lebih dominan diantara kedua KHI ini.

Amin Abdullah juga menawarkan aspek lain dalam menyikapi persoalan pro dan kontra, sakra dan desakral dengan mengedepankan kondisi psikologis, ekonomi dan sosiologis, baik bagi laki-laki maupun perempuan agar mendapatkan perhatian penuh. Hal ini bertujuan agar tercipta empati dan simpati. Pada akhir kesimpulan dari pernyataan dan pandangannya tentang isu reorientasi hukum keluarga pada sinergi antara KHI klasik dan CLD-KHI termasuk RUU-HMPA (Sadari, 2017: xxi).

Pandangan Sahiron Syamsudin Terhadap Reorientasi Hukum Keluarga di Indonesia

Menariknya, guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini membuat ilustrasi atas usul pembaruan KHI ini dengan tiga orang yang tengah berselisih paham atau bertengkar. Setiap pihak memegang pendirian dan memaksakan kehendaknya. Begitulah Sahiron Syamsudin membayangkan pendukung KHI, pendukung CLD-KHI dan pro RUU-HMPA.

Sahiron akhirnya mengungkap reorientasi hukum keluarga atas perdebatan pro dan kontra pada Disertasi Sadari dengan melihat jendela hermeneutika. Menurutnya, Sadari telah tepat memilih *subjektifis cum objektifis*, yakni tidak ikut pro dan kontra pada tema yang kontroversional ini. Justru Sadari hadir merangkul kedua pihak yang telah bertikai seraya melihat apa yang dibutuhkan oleh pro KHI dan apa yang dibutuhkan oleh pro CLD-KHI, serta kebutuhan RUU-HMPA. Dengan pintu masuk yang dilalui Sadari pada Teori Batas Syahrur dengan kerangka batas (hududi). Dalam permasalahan pertikaian ini akhirnya digunakan kata kunci Syahrur yang menonjol yaitu sisi statis dan sisi dinamis dengan pijakan hukum *text is permanent* dan *the content moves* (Sadari, 2017: xxiv).

Kesimpulan pandangan Sahiron, dengan menggunakan metode atau gaya Hududi, pada akhirnya apa yang dipertahankan pendukung KHI masih terjaga begitu juga kebutuhan pendukung CLD-KHI dan RUU-HMPA, tentu dengan harapan KHI Madani dapat terwujud yakni KHI yang relevan dengan modernitas dan keindonesiaan.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pendapat dan pandangan guru-guru besar (profesor) Universitas

Islam Indonesia dapat disimpulkan bahwa Reorientasi Hukum Keluarga Islam merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk dan senantiasa berkembang. Kompilasi Hukum Islam yang modern dan menjaga budaya keindonesiaan dengan bermartabat menjadi KHI Madani yang integratif dan interkoneksi antara KHI klasik, CLD-KHI dan RUU-HMPA. Bila ini terjadi maka akan terwujudlah taqinisasi (islamisasi) hukum nasional yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 1997), h. 90-91
- Amin, Mahir. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4.02 (2014): 322-343.
- Ansori, Isa. "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia." *Nizham Journal of Islamic Studies* 2.1 (2017): 126-142.
- Argenti, Gili. "Civil Society Dan Politik Moral Muhammadiyah." *Jurnal Politikom Indonesiana* 2.2 (2017): 82-82.
- Argenti, Gili. "Civil Society Dan Politik Moral Muhammadiyah." *Jurnal Politikom Indonesiana* 2.2 (2017): 82-82.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 17
- Cresswell, John, and Darrell Fisher. "A Qualitative Description of Teachers' and Principals' Perceptions of Interpersonal Behavior and School Environment." (1998).
- Eka Sakti, Habibullah, "PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG AL-ISTIHSAN." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4.07 (2017).
- Fiji, Abdul Ali. *As-Sulhu wa Al-Wasathatu fii Al-Ahwal As-Syahshiyah: Dirasata fiqhiyyah Qanuuniyah Muqaranah*, Jami'atul Waadi, Dissertation Universitas of Eloued, 2020
- Hendriani, Dita. "SNOUCK HURGRONJE (1857-1936): BIOGRAFI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Widya Citra* 1.1 (2020): 54-70.
- Hermansyah, Hermansyah. "Konflik Dalam Yurisprudensi Islam." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10.1 (2018): 1-1.
- Hikmatullah, Hikmatullah. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 19.1 (2018): 203-226.
- Husda, Husaini. "Islamisasi Nusantara (Analisis Terhadap Discursus Para Sejarawan)." *Jurnal Adabiya* 18.2 (2017): 17-29.
- Ishomuddin, Mr. "From Idealism-Rationalism to Pragmatism-Materialism: Shift in Understanding Religion to Islamic Society in East Java, Indonesia." *2018 3rd International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering (ICESAME 2018)*. Atlantis Press, 2018.
- Jarir, Abdullah. "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia." *Al-Ahkam* 14.2 (2018): 77-90.
- Kojima, Gotaro, et al. "Is living alone a risk factor of frailty? A systematic review and meta-analysis." *Ageing research reviews* 59 (2020): 101048.

- Lippman, Matthew. Islamic Criminal Law and Procedure: Religious Fundamentalism vs Modern Law, *12 B.C. Int'l & Comp. L. Rev.* 29 (1989), <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol12/iss1/3>
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, (1999).
- Ma'rifah, Nurul. "Positivisasi Hukum Keluarga Islam sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13.2 (2019): 243-257.
- Ma'rifah, Nurul. "Positivisasi Hukum Keluarga Islam sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13.2 (2019): 243-257.
- Marjono, *Perempuan Juga Bisa Melampaui Pemimpin Laki-laki*, Media Online Kumparan (Opini dan Cerita), 21 September 2020
- Mosten, Forrest S., and Lara Traum. "The Family Lawyer's Role in Preventive Legal and Conflict Wellness." *Family Court Review* 55.1 (2017): 26-37.
- Mutakin, Ali. "Hubungan Maqashid Al Syari'ah dengan Metode Istinbath Hukum." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17.1 (2017): 113-136.
- Nasir, Muhammad. "Resistensi Ulama Dayah Aceh Tamiang terhadap Hak-Hak Perempuan dalam KHI." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41.1 (2017).
- Putra, I. Gusti Ngurah Edi, Putu Erna Pradnyani, and Ni Wayan Putri Larassita Parwangsa. "Vulnerability to domestic physical violence among married women in Indonesia." *Journal of Health Research* (2019).
- Rahmi Ria, W, and Muhamad Zulfikar. "Hukum Keluarga Islam." (2017).
- Riggsby, Andrew. "Cicero, Documents and the Implications for History." *Omnium Annalium Monumenta: Historical Writing and Historical Evidence in Republican Rome*. Brill, 2018. 257-275.
- Rohman M. F. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 1-27 (2017). <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>
- Sadari, Reorientasi Hukum Keluarga Islam, CV. Iqralana, Tangerang, (2017).
- Solahudin, M. "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Alquran." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1.2 (2016): 115-130.
- Stewart, Gavin. "Marcus Tullius Cicero (106 BCE–43 BCE)." This book is an excellent introduction to the debates currently going on about just war theory and about actual just and unjust wars. Readers will find the centuries long arguments about when to fight and how to fight carefully analyzed and evaluated in a series of highly intelligent and inter-connected essays. (2018): 8.
- Suma, Muhammad Amin. "Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 2.2 (2016): 68-83.
- Yuspin, Wardah. "The Socio-Historical of Indonesian Legal System." *Paper, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2018, Researchgate.com

Zaelani, Zaelani. "Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie in Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio a Contrario Atau Teori Receptio Exit." *Komunike* 11.1 (2019): 128-163.

Zenrif, M. Fauzan. *Realitas keluarga muslim: Antara mitos dan doktrin agama*. UIN-Maliki Press, 2008.